

SARI

Marlina.2016.*Analisis Muatan Sejarah Kontroversial di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004*. Jurusan Sejarah FIS UNNES. Pembimbing: Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A

Kata Kunci: Analisis Muatan, Sejarah Kontroversial, Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA

Buku teks pelajaran Sejarah memiliki peranan penting sebagai media rekam jejak sejarah dan belajar sejarah. Buku teks sebagai media yang penyampaian sejarah belum ideal. Pertarungan kepentingan dalam penulisan sejarah untuk legitimasi kekuasaan baik negara maupun kelompok tetap terjadi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan malpraktik dalam penulisan sejarah melalui buku teks. Permasalahan yang ada tersebut menciptakan tujuan penelitian ini meliputi mengetahui secara teknis pembuatan buku teks; faktor-faktor yang mempengaruhi terciptannya muatan Sejarah kontroversial; perkembangan keberpihakan kepentingan di muatan Sejarah kontroversial di kurikulum dari tahun 1975 sampai 2004.

Objek penelitian ini adalah buku teks sejarah SMA kurikulum 1975 sampai 2004 dan redaksional muatan sejarah kontroversial di buku teks sejarah SMA kurikulum 1975 sampai 2004. Dua objek penelitian tersebut saling memiliki hubungan saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan pendekatan keilmuan bahasa, menggunakan analisis konten inferensial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buku teks pelajaran sejarah SMA merupakan hasil kebijakan pendidikan yang mana kebijakan pendidikan ditentukan melalui proses politik antara lembaga Legislatif dan Eksekutif. Sehingga sangat kental dipengaruhi oleh kepentingan politik baik kepentingan politik negara dan kelompok politik tertentu. Teknik penulisan buku teks dapat dilakukan oleh siapapun yang memenuhi standar penulisan buku teks kementerian pendidikan. Pada Khusus mulai tahun 1994 dalam upaya meningkatkan produksi buku nasional pemerintah memberikan izin dan kesempatan percetakan swasta (nonkementerian) untuk mencetak buku pelajaran. Hingga kurikulum 2004, KBK pun percetakan dibebaskan dilakukan oleh pemerintah. Tahap peredaran buku teks hingga sampai kesekolah bukan tanggungjawab dari kementerian pendidikan dan namun ketersediaan buku disekolah tetap terdapat anggaran dalam pelaksanaan kurikulum.

Perkembangan muatan sejarah kontroversial di buku teks mengalami dinamika dalam pelaksanaan kurikulum dari kurikulum 1975 hingga 2004. Muatan sejarah kontroversial di kurikulum 1975 lebih banyak mengandung sejarah kontroversial yang disebabkan perbedaan metodologi penelitian dan pendekatan yang berbeda serta kepentingan politik. dari 11 isu Sejarah kontroversial hanya 6 yang termuat dalam buku teks pelajaran Sejarah SMA. Pada tahun 1984 sama sekali

tidak ada muatan sejarah kontroversial karena dalam masa tersebut dipublik tidak ada aspek kesejarahan tahun 1975 hingga 1985 yang diperdebatkan. Rezim pemerintahan Soeharto memberikan ruang yang sempit untuk kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dengan ditandai aksi pembredelan buku ataupun media masa. Kemudian di kurikulum 1994 mengalami dua masa corak pendidikan yang berbeda yaitu masa sebelum reformasi dan setelah reformasi. Sebelum reformasi masih sama seperti kurikulum 1985 yakni belum terdapat perdebatan muatan sejarah kontroversial. Baru setelah reformasi muncul kurikulum sejarah dengan Suplemen GBPP yang merombak beberapa tulisan sejarah versi orde baru. Kurikulum sejarah tersebut terlanjung sangat cepat dan singkat sekitar tahun 1997 mulai dirumuskan materi sejarah dengan Suplemen GBPP. Pasca reformasi (sebelum berlakunya kurikulum KBK) Hanya ada 4 muatan Sejarah kontroversial dari 12 isu Sejarah kontroversial yang ada. Hingga kemudian kurikulum 2004 yang berlangsung 2 tahun memuat sejarah kontroversial terkait rezim orde baru. kurikulum 2004 terdapat 13 isu Sejarah kontroversial termuat 6 yang termuat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek kebebasan berpikir (*freedom of thinking*) dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*) sangat mempengaruhi isu yang beredar di publik dan mempengaruhi keberanian isu tertulis lalu masuk dalam dunia pendidikan. Walaupun Selain faktor kepentingan pendidikan; tingkat strategisnya sebuah isu; dan faktor pakar sejarah dalam membahas sejarah pun berpengaruh terhadap termuatnya sebuah isu. Untuk redaksional sejarah kontroversial dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penulisan buku teks terutama mengenai sejarah kontroversial tidak memberikan kesempatan kemungkinan lain dalam kejadian sejarah. Tidak ada alternatif kebenaran lain yang termuat karena kecondongan keperpihkan selalu pada kebenaran yang umumnya diakui dan kebenaran versi penguasa. Redaksional muatan sejarah kontroversial masih mengandung redaksi menghujat penguasa sebelumnya seperti saat rezim Soeharto terdapat hujatan terhadap Soekarno. Fakta lain ketika reformasi penyampaian PKI tidak imbang dalam mengambil data tentang PKI sehingga hanya menonjolkan keburukan PKI. Hal lain di kurikulum 2004, redaksional tidak terlihat penggulingan Soekarno oleh Soeharto namun penulisan seperti kejadian peralihan kekuasaan yang berlangsung normal tanpa kejanggalan.

Saran, perlu adanya pembuatan buku teks pelajaran sejarah yang dimonopoli kebenarannya sebagai landasan dasar belajar sejarah untuk siswa SMA dan perlu ada buku teks pelajaran sejarah yang dibebaskan dalam penulisannya. Kemudian adanya tradisi kebebasan berpikir maupun berbicara untuk meningkatkan kualitas keilmiahan kesejarahan di Indonesia. Pengembangan kurikulum pendidikan dalam redaksional muatan sejarah kontroversial perlu memperbaiki keseimbangan menggunakan data dan melakukan pendamaian sejarah tanpa pewarisan kebencian.